

STUDI DESKRIPTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Adhi Cahya Wiratama

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Tourism is not a new phenomenon in Indonesia. This policy has developed over time. Future tourism development is still considered relevant as an approach to achieve the goal of social welfare and equitable regional development. So that tourism policy should continue to be revised and adapted to the conditions and trends of the present, especially in government management. Hence tourism policy should be based on the latest paradigm of tourism development itself. The problem faced by the lack of communication among stakeholders, budget preparation, competence and the number of implementing policies is still lacking and not optimal community participation. The factors supporting the policy is the commitment of local governments and community support and sufficient resources. The research proves that tourism policy has provided a better change than ever before, especially in the aspect of development of infrastructure supporting tourism, tourism in the community to raise awareness, and raise the image of the area. But the implementation of tourism policy is still less than the maximum. Thus constructive suggestions need to be done to improve the effectiveness and efficiency of policy implementation based on the development of community-based tourism.

Keywords: Policy Implementation, Tourism, Community Based Tourism

Dewasa ini pariwisata mulai menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan, dan menjadi sorotan dari berbagai kalangan bak primadona. Tak bisa dipungkiri bahwa pariwisata merupakan sektor yang bisa dibilang memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena adanya nilai ekonomi yang sangat tinggi, oleh sebab itu pada setiap pembangunan dan perkembangan pariwisata harus benar-benar diperhatikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan aset pariwisatanya, dengan daya tarik wisata yang unik mulai dari alam, budaya dan sejarah. Bermodalkan hal-hal tersebut, Indonesia mampu menjadi destinasi wisata internasional yang *recommended* apabila aset tersebut dioptimalisasikan.

Di tahun 2015 daya saing kepariwisataan Indonesia mulai membaik daripada tahun sebelumnya dengan memiliki skor 4,0 menempati peringkat ke-50 dunia. Indonesia masih jauh tertinggal dari Spanyol (skor 5,3) sebagai kepariwisataan terbaik di dunia, maupun negara-negara dalam satu wilayah Asia Tenggara seperti Singapura (skor 4,9; peringkat 11), Malaysia (skor 4,4; peringkat 25), dan Thailand (skor 4,3; peringkat 35) (World Economic Forum, 2015). Namun daya saing Indonesia dalam industri kepariwisataan masih berada dibawah rata-rata dunia maupun rata-rata wilayah Asia Pasifik. Dibandingkan negara-negara tetangga di wilayah ASEAN dan Australia, daya saing Indonesia hanya lebih tinggi dari daya saing Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar.

Indonesia dalam World Economic Forum berada di peringkat ke-50 dimana pertumbuhan industri pariwisata mencapai lebih dari 8,8 juta wisman pada tahun 2014, hal ini terjadi berkat prioritas utama pemerintah pada industri perjalanan dan pariwisata (peringkat 15) serta investasi berkelanjutan di bidang infrastruktur. Saat ini jaringan telekomunikasi telah mencakup seluruh wilayah Indonesia, infrastruktur transportasi udara juga telah dikembangkan dengan mencapai peringkat ke-39 di dunia dengan transportasi darat berada pada peringkat ke-77. Berbagai perkembangan tersebut mendukung keunggulan Indonesia antara lain pada pilar: harga yang kompetitif (peringkat 3), sumberdaya alam yang kaya (peringkat 19), termasuk keanekaragaman hayati (peringkat ke-4 berdasarkan indikator total spesies yang diketahui) dan beberapa situs-situs budaya (peringkat 10). Namun, Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup pada pilar pelestarian lingkungan (peringkat 134), seperti maraknya penebangan hutan (peringkat 97) sehingga menyebabkan kepunahan (129) dan hanya sedikit pemanfaatan air yang terjadi (peringkat 107). Hal lain yang patut menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah terkait dengan keselamatan dan keamanan (peringkat 104) yaitu mengenai terorisme.

Adapun peningkatan capaian kinerja pada sektor pariwisata pada tataran regional yaitu di Provinsi Jawa Timur dengan berdasarkan data dari kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Juanda & over land di tahun 2014

sebanyak 463.596 orang atau meningkat 54,07% dibanding tahun 2013 sebanyak 300.909 orang. Sedangkan wisatawan nusantara yang mengunjungi Obyek Daya Tarik Wisata sebanyak 45,61 juta orang atau meningkat 14,94% dibanding tahun sebelumnya. Berikut juga hasil dari Capaian Kontribusi Ekonomi Pariwisata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2014 sebesar 101,97 Trilyun rupiah, sedangkan tahun 2013 sebesar 88,16 trilyun rupiah. Jadi secara keseluruhan kontribusi PDRB sektor pariwisata terhadap sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim sebesar 7,89% atau 1,292 trilyun rupiah.¹

Upaya-upaya pemerintah untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan pariwisata tak terlepas oleh adanya peran dari masyarakat, sebab keterlibatan masyarakat saling berkaitan satu sama lain dengan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan dari semua pihak dalam pembangunan pariwisata juga harus dilakukan, terutama dukungan dan partisipasi masyarakat lokal di daerah wisata.

Dalam melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata di Jawa Timur, sejak tahun 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur sudah mengupayakan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di berbagai kawasan desa wisata yang berada di 11 Kabupaten/Kota di bawah Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Madiun. Kesebelas Kabupaten/Kota tersebut antara lain Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Pacitan. Dengan melihat berbagai permasalahan industri pariwisata di Jawa Timur, sinergitas dalam pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar harus dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, peranan Pokdarwis sebagai agen penggerak dalam mendukung terciptanya lingkungan dan suasana kondusif di daerahnya harus segera ditingkatkan (Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Profisnsi Jawa Timur, 2015).²

Di Kabupaten Tulungagung, partisipasi masyarakat kian meningkat seiring permintaan wisatawan akan kebutuhan pariwisata. Tumbuh dan berkembangnya potensi wisata serta banyaknya

destinasi wisata yang baru ditemukan dan dipugar, sangat tidak mungkin apabila semua itu ditangani sendiri oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tulungagung. Maka dalam hal ini harus dilakukan pengambilan peran masyarakat dengan dibentuknya kelompok sadar wisata di setiap destinasi wisata yang ada. Pokdarwis merupakan ujung tombak, yaitu sebagai pelaku utama pariwisata di daerahnya dengan mengelola, memelihara dan berinteraksi langsung kepada wisatawan.

Saat ini sudah terdapat 15 Pokdarwis yang secara resmi terdaftar di Disparpora Kabupaten Tulungagung dengan diterbitkannya Surat Keputusan oleh Kepala Dinas dan beberapa calon Pokdarwis lain yang saat ini sedang dalam proses pembentukan dan pembinaan yang dilakukan oleh Disparpora Kabupaten Tulungagung. Selengkapnya mengenai daftar Pokdarwis yang telah diresmikan di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Daftar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Tulungagung Tahun 2016

Dalam proses optimalisasi pengelolaan destinasi wisata di Tulungagung, fungsi dari pembentukan Pokdarwis tersebut kedepannya juga untuk membantu Disparpora Tulungagung dalam pencakupan data jumlah wisatawan, hal tersebut sangatlah penting karena jumlah wisatawan baik wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung

No.	Kelompok Sadar Wisata	Kecamatan
1	Pokdarwis Ds. Wajak Kidul	Bojolanu
2	Pokdarwis Agro Wisata Kebun Blimbing Moyoketen	Bojolanu
3	Pokdarwis Gunung Budheg	Campurdat
4	Pokdarwis Sanggaria (Pantai Sanggar) Ds. Jenggulharjo	Tanggunggunung
5	Pokdarwis Ds. Ngrejo (Pantai Sioro)	Tanggunggunung
6	Pokdarwis Pantai Brumbun	Tanggunggunung
7	Pokdarwis Ds Pucanglaban (Pantai Kedung Tumpang)	Pucanglaban
8	Pokdarwis Ds. Tanen (Air Terjun Alas Kandung)	Rejotangan
9	Pokdarwis Ds. Sendang (Desa Wisata Sendang)	Sendang
10	Pokdarwis Ds. Geger (Air Terjun Lawean)	Sendang
11	Pokdarwis Ds. Nyawangan	Sendang
12	Pokdarwis Ds. Wonorejo (Ramu Gumbolo)	Pagerwojo
13	Pokdarwis Telaga Ngambal	Kalidawir
14	Pokdarwis Pantai Sine	Kalidawir
15	Pokdarwis Ds. Keboireng (Bayem, Klatak, Nglarap, Gemah)	Besuki

(Disparpora Tulungagung)

merupakan indikator dari peningkatan industri pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Disparpora menyatakan bahwa pihaknya hanya melaksanakan tugas pada tataran pengembangannya saja, sedangkan segala kegiatan pengelolaan destinasi wisata ditangani langsung oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Tulungagung (Laras Pos, 2015).³ Di tahun 2014 tercatat 145.336 wisatawan lokal dan 57 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Tulungagung dengan destinasi wisata Waduk Wonorejo dan Pantai Indah Popoh. Oleh karena itu, dengan adanya peran serta dari Pokdarwis yang telah dibentuk, seluruh data

¹ Kunjungan Wisan ke Jatim Meningkat 54,07%, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam <http://birohumas.jatimprov.go.id/index.php?mod=watch&id=3380> diakses 31 Oktober 2015

² DISBUDPAR Bentuk Kelompok Sadar Wisata di 11 Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/29941> diakses 3 Juli 2015

³ Pengelolaan Tempat Wisata di Tulungagung Belum Maksimal, Laras Pos, dalam <http://www.laraspostonline.com/2015/04/pengelolaan-tempat-wisata-di-tulung.html> diakses 3 Juli 2015

jumlah pengunjung di berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung dapat tercakup dengan baik.

Pembenahan oleh Pemerintah Tulungagung pada sektor pariwisata yang selama ini masih belum dilirik sudah dimulai, karena disadari bahwa potensi wisata di Kabupaten Tulungagung baik budaya, alam dan ekonomi kreatifnya tidak kalah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur (Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajahmada, 2015).⁴ Menurut data dari Disparpora, tercatat bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki 88 daya tarik wisata antara lain: 44 wisata budaya, 31 wisata alam, 9 wisata buatan, dan 4 desa wisata serta masih banyak potensi wisata lain yang belum terdata. Aset-aset tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memutar industri pariwisatanya, karena di situlah terdapat nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan perolehan pada pendapatan asli daerah (PAD). Maka kebijakan yang tepat seperti adanya manajemen yang terintegrasi dalam mengelola seluruh aset wisata tersebut sangat diperlukan, begitu juga pada tahap implementasi kebijakannya yang harus terlaksana dengan efisien, sehingga target yang sudah direncanakan dapat tercapai secara sempurna.

Berbagai penelitian mengenai pariwisata telah dilakukan oleh penggiat pariwisata, akademisi hingga tataran pemerintahan guna mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan pariwisata. Selain itu, perlunya untuk menambah khasanah keilmuan di bidang pariwisata karena masih minimnya penelitian dan kajian tentang pariwisata dirasa sangat penting sekali oleh peneliti untuk melakukan penelitian di bidang pariwisata khususnya kebijakan dan implementasi kebijakan pariwisata.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana implementasi Kebijakan Pariwisata Kabupaten Tulungagung”

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pariwisata Kabupaten Tulungagung.

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

A. Manfaat secara akademis:

1. Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan pembangunan pariwisata.

2. Sebagai rujukan yang relevan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian.

B. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau kontribusi pemikiran bagi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dalam proses implementasi kebijakan pariwisata sehingga mampu memecahkan problema-problema yang muncul di lingkungan masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata.

Landasan Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Soenarko menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun ketetapan Pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak. Jadi jangan salah beranggapan apabila pada realitasnya sering terdapat suatu kondisi yang dirasa perlu adanya tindakan oleh Pemerintah namun Pemerintah nampak tidak melakukan apapun. Hal tersebut bisa dikarenakan untuk mencapai target atau tujuannya, Pemerintah memilih untuk *wait and see* atau *do nothing* karena respon demikian memang merupakan ketetapan atau kebijakan dari Pemerintah itu sendiri dalam menghadapi masalah publik. Menurut Friedrich kebijakan publik adalah suatu arah tindakan bertujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan serta peluang-peluang yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai atau mewujudkan suatu target atau tujuan tertentu.

Hampir sama dengan Fredrich, Anderson menjelaskan kebijakan publik sebagai arah tindakan bertujuan, yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok dalam memecahkan suatu masalah atau urusan yang bersangkutan (Soenarko, 2005). Maka dapat disimpulkan dari definisi-definisi menurut para ahli yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada substansinya kebijakan publik adalah keputusan Pemerintah berdasar kepentingan masyarakat. Oleh karena itu seluruh komponen masyarakat harus dilibatkan dalam seluruh pelaksanaan kebijakan publik mulai dari *planning* karena masyarakat lebih tau masalah publik yang harus diselesaikan bersama dengan Pemerintah hingga tahap *controlling* dan *evaluation* agar masyarakat juga memiliki rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) demi tercapainya kebijakan publik tersebut.

⁴ Rintisan Kerjasama Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah 2015, Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajahmada, Tahun 2015 dalam <http://puspar.ugm.ac.id/webpuspar/?p=1201> diakses 3 Juli 2015

Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya sesuai target yang telah diputuskan sebelumnya. Terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivative* atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2004).

Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn menguraikan bahwa implementasi kebijakan adalah meliputi tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Hal ini termasuk upaya mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi perihal operasional serta melanjutkan upaya tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Widodo, 2011).

Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Widodo menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah berlaku atau dirumuskannya sebuah program. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Setiap kebijakan publik membutuhkan model implementasi kebijakan yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah publik, baik itu diimplementasikan secara *top-down* maupun secara *bottom-up*. Hal tersebut tergantung apa dan bagaimana masalah publik yang akan diselesaikan. Namun Riant Nugroho berpendapat jika kombinasi implementasi kebijakan akan berdampak lebih efektif karena implementasi kebijakan tersebut bersifat partisipatif karena dilaksanakan secara *top-downer* dan *bottom-upper*.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Ada empat faktor menurut Edward III dalam Widodo yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam kebijakan merupakan tahap penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) agar isi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran (*target groups*) dapat dimengerti oleh pelaksana kebijakan, sehingga target dari kebijakan dapat tercapai dengan baik dan efisien karena adanya persiapan

yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan sebelumnya. Ada tiga poin yang harus dipenuhi dalam komunikasi kebijakan, yaitu *transmission*, *clarity*, dan *consistency*

2. Sumber Daya

Pemenuhan sumber daya yang memadai sangat penting sekali agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Ada empat sumber daya menurut Edward yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan antara lain:

- Sumber Daya Manusia
- Sumber Daya Anggaran
- Sumber Daya Peralatan
- Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

3. Disposisi

Adapun variabel penting lain dalam implementasi kebijakan adalah disposisi dari pelaksana kebijakan. Menurut Edward, tingkat keberhasilan dalam kebijakan terjadi karena adanya disposisi yang tinggi dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan segala proses kebijakan. Disposisi juga dapat diartikan sebagai kehendak maupun kecenderungan pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya secara serius dan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Adapun tiga macam bagian penting yang berpengaruh terhadap keinginan dan kemauan dalam melaksanakan kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, serta kecenderungan respon untuk menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*) terhadap kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Sebagai pelaksana sebuah kebijakan, birokrasi harus memiliki koordinasi yang baik agar dapat mendukung jalannya kebijakan yang telah diputuskan. Untuk itu, dalam mempermudah dan menyelaraskan tindakan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya haruslah memperhatikan *fragmentation*, banyaknya pemecahan bagian struktur birokrasi dapat menimbulkan *miscommunication* dan menurunnya koordinasi yang disebabkan oleh distorsi informasi (instruksi) yang terjadi. Dan yang harus diperhatikan selanjutnya ialah *standar operational procedure* baik itu mekanisme, pembagian tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab haruslah jelas agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana.

Community Based Tourism

Community Based Tourism lahir dan berkembang berdasar prinsip keseimbangan dan keselarasan diantara berbagai kepentingan berbagai

stakeholder dalam pembangunan pariwisata yaitu Pemerintah, swasta dan tak terkecuali ialah masyarakat yang merupakan penerima dampak langsung dari setiap kegiatan dari pariwisata yang ada di daerah sekitarnya. Maka dari itu setiap bagian dari pembangunan pariwisata mulai pembuatan kebijakan hingga manajemennya masyarakat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan utama ialah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat selain untuk perkembangan pariwisata itu sendiri.

Peter E. Murphy dalam Sunaryo berpendapat bahwa esensi dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan sangat berkaitan dengan sumber daya dan keunikan masyarakat lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan motor dari kehidupan pariwisata itu sendiri sehingga semestinya pariwisata harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada masyarakat setempat.

Dimensi *Community Based Tourism*

Lima dimensi pembangunan pariwisata dengan pendekatan *Community Based Tourism* menurut Potjana Suansri (2003) yaitu:

1. Ekonomi

- a. Tersedianya anggaran dana untuk *capacity building* organisasi pengelola wisata yang dibentuk oleh masyarakat lokal. Dana tersebut diperoleh dari keutungan usaha-usaha masyarakat yang disisihkan dan dikelola oleh organisasi pengelola destinasi wisata.
- b. Terciptanya berbagai lapangan pekerjaan dari adanya usaha kecil/menengah di sektor pariwisata dan,
- c. Meningkatnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

2. Sosial

- a. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat lokal,
- b. Adanya rasa bangga pada masyarakat akan pariwisata di daerahnya yang menjadi modal masyarakat untuk mempertahankan karakteristik lokalnya,
- c. Pembagian peran yang adil pada seluruh golongan masyarakat baik pria/wanita maupun tua/muda,
- d. Serta menguatnya manajemen internal organisasi di masyarakat lokal.

3. Budaya

- a. Mendorong masyarakat untuk *respect* dan terbuka terhadap perbedaan nilai budaya yang masuk ke dalam lingkungannya, sehingga wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan tidak merasa terasingkan di daerah tersebut.

- b. Membantu berkembangnya pertukaran budaya, dengan cacatan tidak mengurangi estetika budaya lokal yang ada.
- c. Menanamkan prinsip pengembangan pada budaya lokal, seperti atraksi wisata agar selalu memiliki kemasan yang baik untuk disuguhkan kepada wisatawan.

4. Lingkungan

- a. Mempelajari daya dukung daerahnya, dalam hal ini karakteristik lingkungan dan sumber daya alam yang ada.
- b. Melakukan pengelolaan pembuangan sampah atau limbah yang ada di sekitar lokasi wisata.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi di lingkungannya.

5. Politik

- a. Memungkinkan partisipasi dari masyarakat lokal dalam mengambil kebijakan pariwisata di daerahnya melalui musyawarah.
- b. Meningkatkan pengaruh masyarakat secara lebih luas dalam pembangunan pariwisata.
- c. Menjamin hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Disparpora Kabupaten Tulungagung dan 15 Pokdarwis. Informan yang dipilih dalam penelitian adalah Kasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Disparpora. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan 2 informan kunci dan selanjutnya dilakukan *snowball sampling*. Data terkumpul diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Pembahasan Implementasi Kebijakan Pariwisata Kabupaten Tulungagung

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung mulai gencar dilakukan sejak dua tahun kepemimpinan Syahri Mulyo yang menjabat sebagai bupati Tulungagung. Meski pada kepemimpinan bupati sebelumnya sudah dilakukan pengembangan pariwisata, akan tetapi hanya dilakukan pada beberapa lokasi wisata, serta promosi pariwisata yang lebih mengarah pada lingkup pertunjukkan seni dan budaya saja. Berdasar dari permintaan akan kebutuhan pariwisata yang tinggi dan juga pasar industri pariwisata yang kian meluas, Kabupaten Tulungagung dengan bermodalkan aset

pariwisata yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri, menjadikan pengembangan pariwisata sebagai salah satu program maupun kebijakan yang difokuskan saat ini guna mencapai target percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam implementasi kebijakan pariwisata, Pemkab Tulungagung mengerahkan jajaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui berbagai program yang disinergikan. Dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana utama kebijakan, dan dibantu dinas-dinas terkait, kebijakan pariwisata diselenggarakan pula bersama para *stakeholder* pariwisata.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Sebagai salah satu lembaga pelaksana teknis daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati Tulungagung dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Tulungagung

1. Komunikasi

Dalam hal komunikasi, garis besar kebijakan pariwisata disampaikan di internal birokrasi dengan mudah, karena komunikasi di internal birokrasi dilakukan melalui rapat atau musyawarah, hingga komunikasi secara langsung melalui layanan pesan instan seperti grup *whatsapp* di telfon genggam. Namun, dalam tataran implementasi, secara teknis membutuhkan penjelasan lebih lanjut karena informasi juga diarahkan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya, transmisi komunikasi juga disampaikan kepada pihak eksternal birokrasi dengan melalui berbagai saluran komunikasi, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun yang melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal birokrasi. Dalam konteks promosi pariwisata, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan potensi wisata terhadap pasar wisata

yang potensial. Adapun promosi yang dilakukan melalui dua cara yaitu *impersonal communication* atau komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh wisatawan secara langsung melalui rekomendasi dan ulasan wisata yang telah dia rasakan. Yang kedua ialah *interpersonal communication* atau komunikasi pemasaran melalui iklan dan berbagai bentuk promosi lainnya seperti mengikuti pameran dan membuat brosur pariwisata.

Meski sarana transmisi banyak dan beragam, apabila kejelasan isi kebijakan tidak tersampaikan dengan baik, implementasi kebijakan berpotensi tidak optimal dan bahkan dapat menghasilkan perubahan yang tidak dikehendaki. Namun, dalam internal birokrasi penyampaian komunikasi mengenai kebijakan berjalan sangat baik dan jelas.

Adapun dari aspek konsistensi, komunikasi kebijakan pariwisata telah dilaksanakan secara konsisten. Baik di lingkungan internal birokrasi maupun *stakeholder* diluar birokrasi yang memiliki kepentingan komunikasi mengenai kebijakan dilakukan secara intensif. Meskipun terkadang terjadi perubahan, namun hal tersebut berkaitan dengan dinamika kebijakan di lapangan. Dari penelitian yang ditemukan, konsistensi dalam komunikasi kebijakan juga dilaksanakan hingga tataran paling bawah yaitu masyarakat pelaksana kebijakan pariwisata.

2. Sumber daya

a. Sumber Daya Manusia (Staf)

Pada tataran kebijakan pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung disokong oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dari segi kuantitas pelaksana berbagai program kebijakan pariwisata sebenarnya masih cenderung lemah apabila dilimpahkan hanya kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga saja, melihat tuntutan akan kebutuhan pariwisata yang kian meningkat membuat aparatur di bidang tersebut kualahan untuk mengakomodasi seluruhnya. Berdasar pernyataan tersebut, maka dari itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam membantu proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung melalui pembentukan Pokdarwis.

Dari sisi kompetensi pelaksana kebijakan, terdapat adanya kekurangan pada kompetensi pelaksana kebijakan terutama pada konsep utama kebijakan pada sektor pariwisata itu sendiri. Hal tersebut dapat diketahui dari latar belakang pendidikan staf dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang menunjukkan tidak adanya staf yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang pariwisata.

b. Sumber Daya Anggaran

Dukungan pendanaan didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta anggaran lain yang didapat dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat. Rata-rata dukungan pendanaan untuk sektor dari APBD mulai meningkat hingga 1,5 miliar saat ini. Sedangkan dukungan dari APBN masih tidak menentu, karena dana yang diturunkan bersifat dana bantuan yang diperuntukkan untuk promosi wisata saja. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bahwa upaya mengenalkan potensi wisata hanya diperkuat dari sisi promosi, sedangkan untuk fasilitas pendukung wisata masih sangat rendah.

c. Sumber Daya Peralatan

Berdasar temuan penelitian, bahwa adanya sarana dan prasarana yang dirasa belum tercukupi di berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah dikarenakan terbatasnya anggaran. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, jumlah anggaran yang diperuntukkan dalam mengembangkan sektor pariwisata masih terbilang minim. Akan tetapi pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selaku pelaksana teknis tetap akan bekerja semaksimal mungkin dalam menggunakan anggaran tersebut. Oleh sebab itu, saat ini pembangunan di sektor pariwisata dilakukan berdasar skala prioritas

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Informasi yang disampaikan mengenai tujuan kebijakan pariwisata di Kabupaten Tulungagung sebenarnya sudah cukup jelas. Akan tetapi dalam proses implementasinya sangat terkait dengan dinamika di lapangan bila ada perubahan-perubahan pada informasi terkait teknis pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga mengaku apabila segala informasi mengenai kebijakan pariwisata telah didistribusikan dengan baik.

Selanjutnya, sumber daya yang berkaitan langsung dengan informasi adalah kewenangan. Wewenang secara global dapat diartikan sebagai hak untuk bertindak, memutuskan atau memberi perintah. Pada kebijakan pariwisata di Kabupaten Tulungagung, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditunjuk Bupati menjadi pelaksana utama implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Dari susunan kewenangan yang termaktub pada Peraturan Bupati tersebut, dapat diketahui bahwa hal-hal yang menjadi unsur pembentuk wewenang seperti tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sudah sesuai dengan peran

pelaksana utama implementasi kebijakan pariwisata. Maka dalam melaksanakan tugas di lapangan, sesuai konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap pelaksana kebijakan memiliki wewenang menyampaikan informasi kepada masyarakat serta membuat tindakan atau keputusan langsung di lapangan mengenai kebijakan pariwisata sesuai arahan dari atasan.

3. Disposisi

Pada penelitian ini kecenderungan respon pelaksana dalam melaksanakan kebijakan adalah menerima dan mendukung penuh. Selain untuk kemajuan daerah, para pelaksana mendukung karena pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Para pelaksana di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang menjadi pelaku utama kebijakan cukup aktif mengkoordinasi semua hal teknis terkait implementasi yang melibatkan elemen pelaksana lainnya.

Berhasilnya implementasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata sangat bergantung pada kecenderungan publik dalam merespon kebijakan dan implementasinya. Kebijakan pariwisata dalam pengembangannya memang harus melibatkan publik, terutama masyarakat lokal di daerah wisata. Hal tersebut sesuai dengan model *community based tourism* yang digunakan peneliti dalam melihat pariwisata di Kabupaten Tulungagung dan akan dipaparkan pada bagian berikutnya. Jika merujuk pada konsep tersebut, titik tekan yang menjadi fokus pengembangan pariwisata adalah terlibatnya masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata di daerahnya. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sangat aktif melakukan pembentukan Pokdarwis dan bimbingan kepada masyarakat di daerah lokasi wisata.

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan publik dalam implementasi kebijakan pariwisata Kabupaten Tulungagung memang ada, akan tetapi belum secara keseluruhan. Walaupun begitu komitmen masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Tulungagung kedepannya menunjukkan kearah positif.

4. Struktur birokrasi

Secara formal, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan bagian inti pada struktur organisasi pelaksana kebijakan pariwisata. Namun, pada implementasi berbagai program dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Tulungagung, struktur organisasi tersusun dari berbagai elemen, baik dari Dinas/Instansi pendukung maupun Swasta seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Biro Perjalanan Wisata, LSM dan Komunitas.

Fragmentasi dapat dihindari di internal birokrasi sehingga tidak terjadi pemecahan

koordinasi pada implementasi kebijakan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan di lapangan melibatkan banyak badan/organisasi yang lain seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup dan Perhutani, pusat koordinasi tetap berada pada Bupati selaku Kepala Daerah.

Dalam penelitian ini, terungkap apabila tidak ada SOP yang baku dalam proses pelaksanaan kebijakan. Aparat pelaksana menyatakan bahwa hanya perda dan APBD yang menjadi panduan umum mengenai garis besar kebijakan. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, aparat pelaksana juga mengungkapkan apabila tugas tersebut sudah diatur secara lengkap pada dokumen struktur organisasi dan tupoksi bidang.

Kelompok Sadar Wisata Dalam Dimensi *Community Based Tourism*

1. Ekonomi

Pada dimensi ekonomi, yang dalam hal ini adalah kondisi perekonomian masyarakat lokal di daerah wisata, dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemkab Tulungagung ke berbagai daerah lokasi wisata memberikan dampak positif kepada masyarakat yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata. Mudah-mudahan akses menuju destinasi wisata sudah memberikan dampak yang signifikan, walaupun masih belum mencakup secara keseluruhan, namun dampak tersebut sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat pelaku wisata. Bersamaan dengan itu, beberapa lapangan pekerjaan juga tercipta di daerah lokasi wisata seperti pedagang makanan dan minuman, *tour guide*, tukang ojek hingga tukang parkir. Disamping itu, sebagian dari pendapatan masyarakat pelaku wisata juga turut disisihkan pula untuk keperluan kas Pokdarwis yang selanjutnya dana tersebut dikelola sebagai penunjang kebutuhan dan pengembangan kelompok. Hal ini dilakukan untuk melatih kemandirian Pokdarwis secara finansial agar tidak berharap lebih pada bantuan dana dari pemerintah.

2. Sosial

Dari data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, pembangunan pariwisata yang dilakukan telah menumbuhkan rasa bangga pada seluruh masyarakat terhadap pariwisata yang ada di daerahnya, baik dengan destinasi wisata yang mereka kelola maupun pariwisata secara keseluruhan di Kabupaten Tulungagung. Adapun kondisi tersebut didasarkan pada temuan yang menunjukkan bahwa semua masyarakat menyatakan kebanggaannya pada pariwisata daerah.

Kemudian juga ditunjukkan pada tabel apabila peningkatan kualitas hidup hanya dirasakan pada sebagian masyarakat, begitu pula dengan penguatan

manajemen organisasi yang belum terlaksana di semua Pokdarwis. Hal tersebut berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang masih baru dirintis, sehingga hasil dari upaya tersebut sebagian masih belum dirasakan oleh masyarakat. Alasan tersebut juga mendasari mengapa pembagian peran juga belum terlaksana, karena dalam tahap perintisan pengembangan pariwisata sebagian besar dilakukan oleh kaum pria.

3. Budaya

Pembinaan yang dilakukan pemerintah saat ini masih pada tataran budaya lokal seperti tradisi dan kesenian saja. Sedangkan pembinaan mengenai adanya pertukaran budaya yang masuk masih belum dilakukan karena saat ini wisatawan yang masuk ke Kabupaten Tulungagung mayoritas masih didominasi oleh wisatawan lokal saja. Tidak seperti pada Kabupaten Banyuwangi dan Pacitan yang baru-baru ini sudah mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Selain itu, pembinaan dan penanaman prinsip pengembangan budaya lokal saat ini sudah mulai gencar dilakukan oleh pemerintah, terbukti dari beberapa tradisi lokal yang ada, dengan salah satunya yaitu upacara adat Labuh Laut Larung Semboyo menjadi agenda rutin tahunan yang dilakukan di lokasi Pantai Sine.

4. Lingkungan

Pelaksanaan pembangunan pariwisata erat kaitannya dengan menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena keadaan lingkungan juga merupakan suatu produk wisata. Apabila lingkungan di sekitar lokasi wisata terjaga dengan baik, dengan demikian hal tersebut akan menjadi nilai tambah dalam menarik wisatawan. Oleh sebab itu, dalam membuat kebijakan pariwisata pemerintah juga harus menyelipkan program-program yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Merujuk pada dimensi lingkungan, kebijakan pariwisata Pemkab Tulungagung saat ini dalam programnya masih mengawali dari tahap penghijauan, sedangkan program pengelolaan sampah dan limbah masih belum dilakukan. Beberapa tindakan terhadap lingkungan yang dilakukan sebenarnya memiliki tujuan utama yaitu untuk menanggulangi bencana serta untuk tujuan konservasi, namun tidak menutup kemungkinan tindakan tersebut juga mengarah ke tujuan pariwisata.

Adapun tindakan pemerintah dalam penanganan lingkungan di daerah pantai dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tulungagung. Walaupun penghijauan yang dilakukan bukan mengarah ke tujuan pengembangan pariwisata, namun hal tersebut dinilai positif karena wilayah pantai yang merupakan bagian dari destinasi wisata. Penghijauan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut ialah dengan melakukan

penanaman pohon Cemara Udang dan *Mangrove* yang bertujuan untuk mengantisipasi tsunami.

5. Politik

Dengan adanya pembentukan Pokdarwis oleh Pemkab Tulungagung, aspirasi dan peran masyarakat di daerah wisata lebih terwadahi. Sehingga pada setiap tahapan pada proses pembangunan yang ada, masyarakat dapat ikut andil secara langsung. Selain itu masyarakat juga diberikan wewenang penuh dalam mengelola segala potensi sumber daya yang terdapat di daerahnya tanpa intervensi berlebih dari pemerintah. Karena untuk target kedepannya masyarakat diharapkan lebih mandiri dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pengembangan pariwisata tugas pemerintah hanya sebagai fasilitator saja seperti penyediaan infrastruktur penunjang dan pembinaan. Sedangkan dalam mengambil keputusan dalam mengembangkan destinasi wisata, diserahkan penuh kepada masyarakat melalui forum internal Pokdarwis maupun secara musyawarah dalam Forum Komunikasi Pokdarwis yang telah dibentuk.

Kesimpulan

Sejumlah kesimpulan yang bisa diambil setelah tahap-tahap penelitian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pariwisata daerah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana utama dengan bersinergi kepada dinas/instansi terkait serta masyarakat pelaku wisata. Kebijakan pariwisata di Kabupaten Tulungagung merupakan kebijakan yang dilakukan bersamaan dengan hak kelola lahan, pembangunan infrastruktur, pelestarian budaya, pelestarian lingkungan serta promosi daerah. Kebijakan pariwisata yang dilakukan secara intensif sejak dua tahun terakhir dalam kepemimpinan Bupati Syahri Mulyo cukup membuahkan hasil dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dilihat dari data jumlah wisatawan yang berkunjung dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pariwisata. Adapun pada implementasinya, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat kebijakan pariwisata di Kabupaten Tulungagung, yaitu:

- a. Kurang terintegrasinya hubungan *stakeholder* kebijakan yang dapat menimbulkan *miscommunication*, sehingga kebijakan tidak sesuai tujuan awal.
- b. Minimnya jumlah pelaksana teknis kebijakan pariwisata yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan pariwisata di berbagai destinasi wisata kurang tercapai secara menyeluruh;

- c. Rendahnya kualifikasi pelaksana teknis kebijakan dan kurangnya tenaga ahli di bidang pariwisata;
- d. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang masih baru dirintis, sehingga pemerintah masih perlu melakukan pembinaan secara berkala agar masyarakat lebih terampil dalam mengelola wisata di daerahnya;
- e. Kejelasan status hak kelola lahan (daerah lokasi wisata) yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan di suatu lokasi wisata.

Disamping adanya beberapa faktor penghambat, terdapat sejumlah faktor pendukung yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Tulungagung, antara lain:

- a. Komitmen dari pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata yang merupakan motor penggerak birokrasi dan sumber daya yang ada untuk memacu berbagai program pariwisata;
- b. Tingginya antusiasme masyarakat yang ikut membantu mengembangkan pariwisata mulai dari promosi hingga pembangunannya.
- c. Keanekaragaman potensi wisata yang masih belum diolah dan dikembangkan sebagai industri pariwisata.
2. Standar kebijakan pariwisata yang optimal ialah dengan lebih memperhatikan dimensi-dimensi pada model *community based tourism*. Pengembangan pariwisata secara intensif harus dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat sebagai pelaku utama pada seluruh dimensi dalam *community based tourism*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat, beberapa saran tersebut diantaranya:

1. Perlu adanya penambahan kegiatan sosialisasi mengenai prosedur menjadi TKI yang legal ke daerah-daerah di wilayah Jawa Timur khususnya di wilayah dengan jumlah TKI yang besar, hal ini untuk mencegah dan mengurangi praktik-praktik ilegal dari calo-calo TKI. Pemerintah pusat harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut, yaitu dengan cara memasang iklan-iklan di media cetak, media elektronik, dan media sosial.
2. Penambahan jumlah petugas/staf untuk menunjang pelayanan perlindungan sosial yang dilakukan di UPT P3TKI Jawa Timur kemudian melakukan sistem rolling antar

- pegawai agar pegawai tidak jenuh dengan pekerjaannya.
3. Renovasi sarana prasarana dan fasilitas pendukung seperti toilet yang layak, ruang kelas yang nyaman untuk PAP , sehingga calon TKI merasa nyaman.
 4. Perlu adanya pelatihan untuk pegawai-pegawai UPT P3TKI agar mereka memiliki kompetensi yang semakin baik.

Daftar Pustaka

- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Gramedia. Jakarta
- Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press. Surabaya
- Suansri, Potjana. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Rest Project. Thailand
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang.